



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

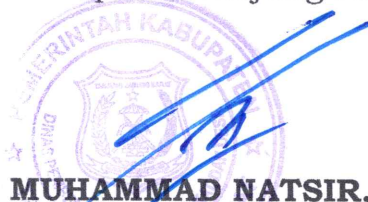
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan hasil kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan target capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan di desa dan kelurahan pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum.

Kuala Tungkal, Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 198406242011011005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas yang mengacu terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders).

LKIP Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 4 (empat) program; Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan jumlah total anggaran Rp9.443.194.481,- yang dapat terealisasi sebesar Rp8.555.401.098,- atau sebesar 90,60% dengan realisasi fisik 100%.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2025 antara lain;

1. Masih kurangnya kuantitas dan kapabilitas SDM di Dinas PMD terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa
3. Masih kurang optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Belum optimalnya pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan
5. Masih rendahnya kerjasama antar desa
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi di desa

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi permasalahan diatas, adalah dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap aparatur desa.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategis	8
C. Dasar Hukum	8
D. Sistem Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Langkah Kedepan	64

Lampiran; Perjanjian Kinerja 2025

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
Tabel II.1	Rencana Strategis 2025-2030.....	12
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama	12
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 sebelum Perubahan	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 setelah Perubahan	13
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu	13
Tabel III.1	Indeks Desa Tahun 2025.....	16
Tabel III.2	Target dan Realisasi Kinerja Eselon II Tahun 2025.....	33
Tabel III.3	Target dan Realisasi Kinerja Eselon III Tahun 2025.....	34
Tabel III.4	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu.....	35
Tabel III.5	Klasifikasi 114 Desa Periode 2021-2024 berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).....	37
Tabel III.6	Data IDM Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024....	38
Tabel III.7	Perbandingan status desa hasil pendataan IDM 2024 dan Indeks Desa 2025.....	45
Tabel III.8	Target dan Realisasi RPJMD 2021-2026.....	49
Tabel III.9	Target dan Realisasi RPJMD 2025-2030.....	50
Tabel III.10	Capaian kinerja terhadap target akhir Renstra 2021-2026	54
Tabel III.11	Capaian kinerja terhadap target akhir Renstra 2025-2029	54
Tabel III.12	Perbandingan capaian IDM Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....	54
Tabel III.13	Program dan Kegiatan yang berpengaruh terhadap Pencapaian kinerja	56
Tabel III.14	BUMdesa yang berkontribusi terhadap PAD.....	58
Tabel III.15	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan peran aktif seluruh Lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi bulan gotong royong masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa, fasilitasi tim penggerak PKK, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasam antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten, fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten, dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM desa) dan Lembaga Kerjasama antar Desa, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

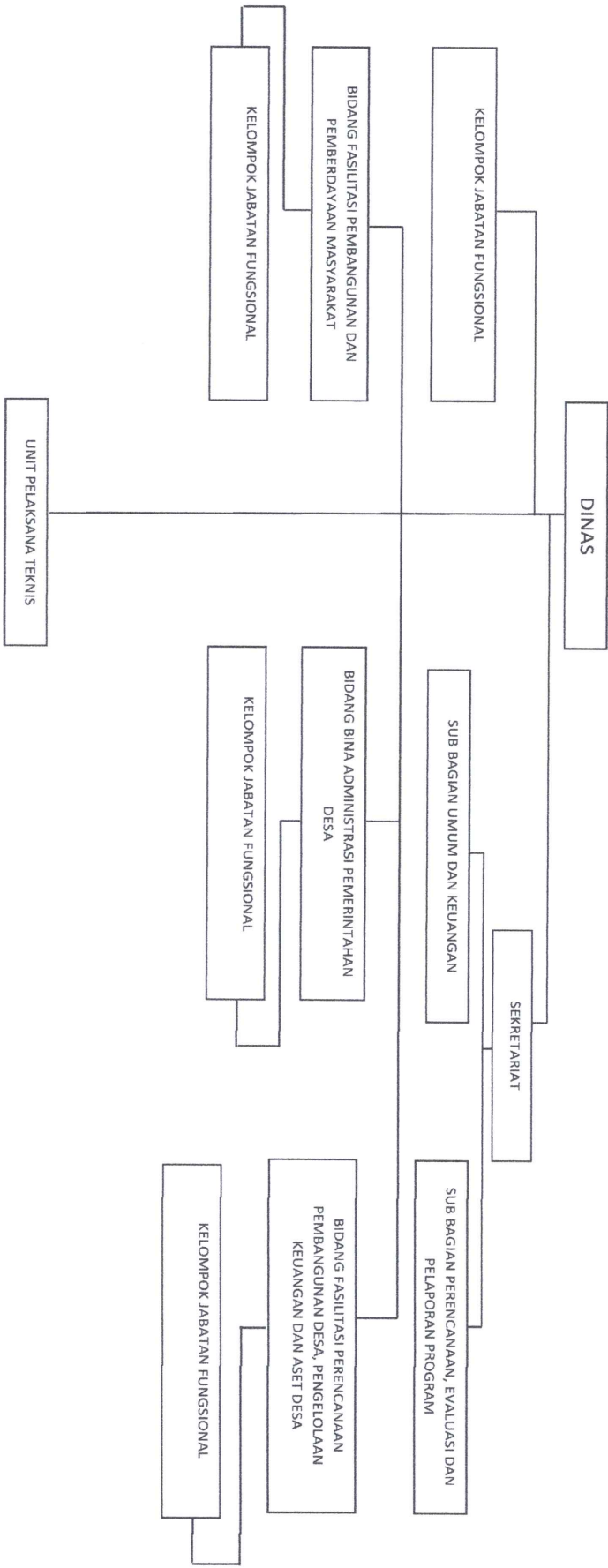
- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, tata wilayah desa, penataan kewenangan desa, penamaan dan kode desa, penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat, dan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan produk hukum desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan laporan kepala desa dan pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, manajemen pemerintahan desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka keberhasilan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025 sebanyak 29 orang ASN (25 orang PNS, 4 orang PPPK) dan 20 orang PPPK Paruh waktu dan 2 orang TKK, sesuai tabel dibawah ini;

Tabel I.1 Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Tingkat I	IV /b	2	1	1				
2	Pembina	IV /a	4	2	2				
3	Penata Tingkat I	III/d	7		6	1			
4	Penata	III/c	2		2				
5	Penata Muda	III/a	6		2		4		
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	1					
7	Pengatur Tingkat I	II/d	2				2		
8	Pengatur	II/c	1				1		
9	PPPK	IX	2		2				
10	PPPK	V	2				2		
11	PPPK paruh waktu	-	20		5		15		
12	Honorar	-	2		1		1		
Jumlah			51	4	21	1	25		

B. Isu Strategis

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

1. Perlunya pendampingan desa
2. Peningkatan kerjasama desa
3. Pengelolaan keuangan desa dan aset desa secara digital
4. Pengelolaan BUMdesa dan BUMdesa bersama
5. Perlunya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
6. Peningkatan Pemanfaatan teknologi di Desa

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, dengan memperhatikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi, yaitu;

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

D. Sistem Penyajian

Mekanisme penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu pada sistematika sebagai berikut;

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

Bab.II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025-2029 tujuan, sasaran, indikator dan target selama lima tahun, lalu target IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab. III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta Langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Lampiran;

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu;

I. Visi “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)”

II. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2025-2029, dalam mencapai Visi sebagai berikut;

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan Inovatif
2. Berkah dalam peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke 3 (tiga), yaitu “Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”

Tabel II.1. Rencana Strategis 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa (Rata-rata)	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	
			Persentase Desa Mandiri	5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%	
		Meningkatnya desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%	

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur sejauh mana Dinas PMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja utama rencana strategis.

Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa (Rata-rata)	$= \frac{\text{Total Indeks Desa seluruh desa}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
		Persentase desa mandiri	$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	5,26%	7,02%	8,77%	10,53 %	12,28%	14,04 %		

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya desa maju	Persentase desa maju	$= \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	34,21 %	36,84%	38,60%	40,35 %	42,11%	43,86 %	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 sebelum perubahan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	83
		Nilai SAKIP Dinas PMD	72
2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	33%

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 setelah perubahan.

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (Rata-rata)	67,58
		Persentase Desa Mandiri	5,26%
2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21%
3.	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisien dan efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	86 (B)
		Nilai SAKIP Dinas PMD	79 (BB)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap apa yang akan dicapai pada tahun 2025 Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja, merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Tabel. II.5. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu sebagai berikut;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	100%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan,	2 Desa

	perubahan status desa	penggabungan, dan perubahan status desa	
II.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	45%
		Persentase penggunaan dana desa yang sesuai dengan peraturan	100%
		Persentase BUMdesa dan BUMdesa bersama yang telah mencapai pemeringkatan dengan status berkembang	40%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen
b.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang
c.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 dokumen
d.	Terselenggarakannya Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 laporan
e.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 dokumen
f.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen
g.	Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 orang
h.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa
i.	Terlaksananya Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	114 laporan
j.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen
III.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%
	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%

	bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten/kota		
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	289 lembaga
	Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan
	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini adalah klasifikasi desa berdasarkan data Indeks Desa (ID). Indeks Desa yang mengukur 6(enam) dimensi, yaitu; Layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.

1. Dimensi Layanan Dasar, meliputi sub dimensi Sarana Pendidikan, sub dimensi Sarana Kesehatan dan sub dimensi infrastruktur utilitas dasar
2. Dimensi Sosial, sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas masyarakat
3. Dimensi Ekonomi, sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi
4. Dimensi Lingkungan, sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana
5. Dimensi Aksesibilitas, sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata Kelola keuangan desa

Berikut tabel capaian Indeks Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 berdasarkan Kepmendes PDT Nomor 343 Tahun 2025;

Tabel III. 1 Indeks Desa Tahun 2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PMD

TAHUN 2025

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	SKOR (%)	STATUS INDEKS DESA 2025
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012001	BADANG	143	57	103	30	36	66	0,6850	68,50	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012002	TANJUNG TAYAS	105	70	77	57	41	65	0,6535	65,35	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012003	KUALA DASAL	117	54	82	66	40	63	0,6646	66,46	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012004	PEMATANG PAUH	108	61	86	51	42	61	0,6441	64,41	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012006	TAMAN RAJA	121	63	100	48	42	67	0,6945	69,45	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012017	BRASAU	118	43	98	38	37	77	0,6472	64,72	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	1506012019	GEMURUH	129	62	96	46	40	61	0,6835	68,35	BERKEMBANG

TAHUN
2025

[illegible]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

TAHUN 2025

DINAS PMD

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032012	SUNGAI PAMPANG	106	51	84	38	46	52	0,5937	59,37	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032013	PARIT SIDANG	121	46	85	51	31	63	0,6252	62,52	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032014	SUNGAI JERING	126	64	101	58	46	71	0,7339	73,39	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032015	PARIT BILAL	113	61	107	47	36	61	0,6693	66,93	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032016	SUAK SAMIN	101	62	83	42	27	58	0,5874	58,74	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032017	SUNGAI BAUNG	100	55	108	58	46	48	0,6535	65,35	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032018	KARYA MAJU	134	66	119	58	45	59	0,7575	75,75	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN	1506032019	SUNGAI RAYA	113	65	69	42	44	45	0,5963	59,53	BERKEMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PMD

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042012	PEMATANG BULUH	127	68	89	58	42	78	0,7276	72,76	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042013	MUNTIALO	120	65	103	62	38	72	0,7244	72,44	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042014	TELUK KULBI	111	51	100	57	37	69	0,6693	66,93	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042015	BUNGA TANJUNG	87	74	128	68	42	76	0,7480	74,80	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042016	SUNGAI TERAP	111	63	116	76	36	69	0,7417	74,17	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	1506042017	MANDALA JAYA	128	53	112	60	49	56	0,7213	72,13	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052005	PENYABUNGAN	121	80	96	78	41	77	0,7764	77,64	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052006	LUBUK TERAP	155	69	85	45	39	68	0,7260	72,60	MAJU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2025

	BARAT												
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052008	TANJUNG PAKU	121	59	79	62	41	57	0,6598	65,98	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052012	TANJUNG BENANAK	152	80	140	52	46	74	0,8567	85,67	MANDIRI
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052013	BUKIT HARAPAN	153	77	124	62	40	72	0,8315	83,15	MANDIRI
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052014	ADI PURWA	152	81	110	62	37	80	0,8220	82,20	MANDIRI
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052018	PINANG GADING	144	82	117	86	41	59	0,8331	83,31	MANDIRI
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052020	MERLUNG	108	33	90	60	49	64	0,6362	63,62	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	1506052021	TANJUNG MAKMUR	133	48	104	56	38	67	0,7024	70,24	MAJU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PMD

TAHUN 2025

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062002	PURWODADI	164	67	155	72	39	72	0,8961	89,61	MANDIRI
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062003	SUKA DAMAI	140	65	103	50	34	80	0,7433	74,33	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062004	ADI JAYA	119	65	103	50	34	79	0,7087	70,87	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062005	KELAGIAN	101	51	104	44	31	61	0,6173	61,73	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062006	TELUK PENGKAH	121	65	80	46	41	51	0,6362	63,62	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062007	TALANG MAKUR	109	48	89	56	42	63	0,6409	64,09	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062008	SUNGA KERUH	127	63	118	50	34	70	0,7276	72,76	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBING TINGGI	1506062009	DATARAN KEMPAS	151	66	142	66	47	77	0,8646	86,46	MANDIRI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN DINAS PMD 2025

	BARAT												
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BATANG ASAM	1506072008	SUNGAI PENOBAN	138	68	106	72	46	61	0,7732	77,32	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BATANG ASAM	1506072009	RAWANG KEMPAS	116	56	91	42	36	74	0,6635	66,35	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BATANG ASAM	1506072010	LUBUK LAWAS	111	65	75	58	35	71	0,6635	66,35	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BATANG ASAM	1506072011	SUNGAI BADAR	122	60	101	42	37	72	0,6635	66,35	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082002	PULAU PAUH	126	52	75	54	49	60	0,6651	66,51	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082003	RANTAU BENAR	117	73	83	49	40	69	0,6787	67,87	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082004	LAMPISI	99	63	118	44	43	67	0,6635	66,35	BERKEMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN DINAS PMD 2025

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082005	CINTA DAMAI	128	74	103	50	40	60	0,7165	71,65	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082006	SUNGAI ROTAN	116	71	78	49	40	69	0,6661	66,61	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082007	MUARA DANAU	119	61	89	60	40	50	0,6598	65,98	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082008	TANAH TUMBUH	109	73	78	48	39	59	0,6394	63,94	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082009	SUNGAI PAUR	88	66	99	48	35	69	0,6378	63,78	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	RENAH MENDALUH	1506082010	BUKIT BAKAR	116	66	66	42	33	52	0,5906	59,06	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MUARA PAPALIK	1506092002	DUSUN MUDO	120	66	99	54	41	76	0,7181	71,81	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MUARA PAPALIK	1506092003	INTAN JAYA	105	36	107	53	41	66	0,6425	64,25	BERKEMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PMD

TAHUN 2025

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102002	TUNGKAL IV DESA	140	60	104	58	46	70	0,7528	75,28	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102003	KUALA BARU	127	59	60	60	47	64	0,6567	65,67	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102004	TELUK PULAI RAYA	93	65	111	41	45	71	0,6709	67,09	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102005	MEKAR ALAM	122	48	103	47	45	62	0,6724	67,24	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102006	HARAPAN JAYA	130	65	98	56	39	52	0,6929	69,29	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102007	KUALA KAHAR	118	70	101	54	42	54	0,6913	69,13	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	1506102008	MUARA SEBERANG	101	50	102	56	25	62	0,6236	62,36	BERKEMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PMD

TAHUN 2025

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112002	BRAM ITAM KANAN	128	62	97	47	38	65	0.6882	68.82	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112003	TANJUNG SENJULANG	109	43	87	46	49	60	0.6205	62.05	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112004	PEMBENGIS	127	60	115	50	49	69	0.7402	74.02	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112005	BRAM ITAM RAYA	134	61	128	57	45	72	0.7827	78.27	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112006	PANTAI GADING	114	41	107	49	41	56	0.6425	64.25	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112007	JATI EMAS	112	59	97	44	40	62	0.6520	65.20	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM ITAM	1506112008	KEMUNING	104	75	82	52	34	61	0.6425	64.25	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG	BRAM ITAM	1506112009	MEKAR TANJUNG	103	69	104	42	47	56	0.6630	66.30	BERKEMBANG

TAHUN
2025

[illegible]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN DINAS PMD 2025

JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	KUALA BETARA	1506122008	SUNGAI DUNGUN	124	47	76	38	38	68	0,6157	61,57	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	KUALA BETARA	1506122009	KUALA INDAH	123	72	71	52	44	55	0,6567	65,67	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	KUALA BETARA	1506122010	SUAK LABU	113	72	71	52	44	55	0,6409	64,09	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132002	SUNGAI KAYU ARO	103	65	83	40	38	43	0,5858	58,58	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132003	TELUK KETAPANG	132	64	107	43	46	51	0,6976	69,76	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132004	SUNGAI RAMBAI	128	76	109	56	40	69	0,7528	75,28	MAJU
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132005	MARGO RUKUN	108	60	93	49	34	55	0,6283	62,83	BERKEMBANG
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132006	KEMPAS JAYA	118	74	116	48	43	54	0,7134	71,34	MAJU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PMD

	BARAT																		
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132007	LUMAHAAN	111	49	122	46	41	70	0,6913	69,13	BERKEMBANG						
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132008	SUNGAI LANDAK	100	53	97	46	42	60	0,6268	62,68	BERKEMBANG						
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132009	SUNGSANG	87	56	101	51	35	64	0,6205	62,05	BERKEMBANG						
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SENERANG	1506132010	SUNGAI KEPAYANG	108	52	108	42	38	42	0,6142	61,42	BERKEMBANG						
rata-rata					118,72	60,72	99,82	52,82	40,19	64,05	0,69	68,71							

Pengukuran capaian kinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan Kepala Perangkat Daerah (Eselon II) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut;

1) Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel III.2. Target dan Realisasi Kinerja Eselon II Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (Rata-rata)	67,58	68,71
		Persentase Desa Mandiri	5,26%	5,26%
2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21%	34,21%
3.	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisien dan efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	86 (B)	83,06
		Nilai SAKIP Dinas PMD	79 (BB)	79,47

Realisasi kinerja pada perjanjian kinerja eselon II, hanya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD, yang belum mencapai target, dengan persentase capaian 97%, sehingga kedepan perlu dilakukan peningkatan pelayanan.

Tabel III.3. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung jawab
I.	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	100%	25%	Kabid BAPD
II.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	45%	42%	Kabid BAPD
		Persentase penggunaan dana desa yang sesuai dengan peraturan	100%	100%	Kabid FPPKAD
		Persentase BUMdesa dan BUMdesa bersama yang telah mencapai pemeringkatan dengan status berkembang	40%	31%	Kabid FPPM
III.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	Kabid FPPM

Pada indikator Persentase fasilitasi penataan desa, tidak dapat mencapai target dikarenakan terkendala batas desa yang ingin dimekarkan, sedangkan pada indikator persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya terkendala pendanaan, sehingga hanya 57 orang aparatur desa dan 114 anggota BPD yang mendapatkan pelatihan .

Pada indikator Persentase BUMdesa dan BUMdesa bersama yang telah mencapai pemeringkatan dengan status berkembang, dikarenakan ada BUM desa dan BUMdesa bersama yang tidak melengkapi data.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja para pejabat fungsional tertentu (Penggerak swadaya masyarakat, Analis kebijakan, dan Penyuluh hukum)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 Desa	0 Desa
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	114 dokumen
b.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang	57 orang
c.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 dokumen	1 dokumen
d.	Terselenggarakannya Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 laporan	8 laporan
e.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
f.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	1 dokumen
g.	Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 orang	114 orang
h.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	10 desa

i.	Terlaksananya Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	114 laporan	114 laporan
j.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	2 dokumen
1.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten/kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%
a.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	289 lembaga	289 lembaga
b.	Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	1 laporan
c.	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1 dokumen

Indikator kinerja yang tidak terealisasi, yaitu Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa dikarenakan belum adanya penetapan dan penegasan batas desa yang ingin dimekarkan, yaitu Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi dan Desa Suban Kecamatan Batang Asam. Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan 10 laporan, dapat terealisasi 8 laporan dikarenakan ada 2 Desa yang tidak melaksanakan PAW Kepala Desa, yaitu Desa Purwodadi dan Desa Sungai Rambai.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.5. Klasifikasi 114 Desa periode 2021-2024 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM)

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa berdasarkan Data IDM Tahun			
	2021	2022	2023	2024
1. Desa Mandiri	3 (2,63%)	4 (3,51%)	7 (6,14%)	14 (12,28)
2. Desa Maju	18 (15,79%)	23 (20,18%)	31 (27,19%)	28 (24,56)
3. Desa Berkembang	91 (79,83%)	87 (76,32%)	76 (66,67%)	72 (63,16)
4. Desa Tertinggal	2 (1,75%)	0	0	0
5. Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0

Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2021-2024, terjadi peningkatan jumlah status Desa mandiri, Desa maju dan penurunan jumlah desa dengan stus berkembang, untuk setiap tahunnya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PMD

TAHUN 2025

Tabel III.6. Data IDM Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA DESA	STATUS IDM			
				2021 (28 Mei 2021	2022 (Kamis,28 April 2022)	2023 (Kamis,27 Juni 2023)	2024 (Kamis, 4 Juli 2024)
1	TUNGKAL ULU	1	BADANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		2	TANJUNG TAYAS	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		3	KUALA DASAL	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		4	PEMATANG PAUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		5	TAMAN RAJA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		6	BRASAU	Maju	Maju	Maju	Maju
		7	GEMURUH	Berkembang	Maju	Berkembang	Berkembang
		8	PEMATANG TEMBESU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		9	BADANG SEPAKAT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
2	TUNGKAL ILIR	10	TUNGKAL I	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		11	TELUK SIALANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
3	PENGABUAN	12	PARIT PUDIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		13	SUNGAI SERINDIT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD

TAHUN
2025

		14	MEKAR JATI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		15	SUNGAI PAMPANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		16	PARIT SIDANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		17	SUNGAI JERING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		18	PARIT BILAL	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		19	SUAK SAMIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		20	SUNGAI BAUNG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		21	KARYA MAJU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		22	SUNGAI RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		23	PASAR SENIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
4	BETARA	24	PEMATANG LUMUT	Maju	Maju	Maju	Maju
		25	MAKMUR JAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		26	SERDANG JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
		27	TERJUN GAJAH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		28	LUBUK TERENTANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		29	PEMATANG BULUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		30	MUNTIALO	Maju	Maju	Maju	Maju
		31	TELUK KULBI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		32	BUNGA TANJUNG	Maju	Maju	Maju	Maju

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD **TAHUN 2025**

		33	SUNGAI TERAP	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		34	MANDALA JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
5	MERLUNG	35	PENYABUNGAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		36	LUBUK TERAP	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		37	TANJUNG PAKU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		38	TANJUNG BENANAK	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		39	BUKIT HARAPAN	Maju	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		40	ADI PURWA	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		41	PINANG GADING	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		42	MERLUNG	Maju	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		43	TANJUNG MAKMUR	Maju	Maju	Maju	Maju
6	TEBING TINGGI	44	PURWODADI	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		45	SUKA DAMAI	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		46	ADI JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
		47	KELAGIAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		48	TELUK PENGKAH	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		49	TALANG MAKMUR	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		50	SUNGAI KERUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		51	DATARAN KEMPAS	Maju	Maju	Maju	Mandiri

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD

TAHUN
2025

		52	DELIMA	Maju	Maju	Maju	Maju
7	BATANG ASAM	53	SRI AGUNG	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		54	SUBAN	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		55	TANJUNG BOJO	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		56	KAMPUNG BARU	Maju	Maju	Maju	Maju
		57	LUBUK BERNAI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		58	RAWA MEDANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		59	SUNGAI PENOBAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		60	RAWANG KEMPAS	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		61	LUBUK LAWAS	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		62	SUNGAI BADAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
8	RENAH MENDALUH	63	PULAU PAUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		64	RANTAU BENAR	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		65	LAMPISI	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		66	CINTA DAMAI	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		67	SUNGAI ROTAN	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		68	MUARA DANAU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		69	TANAH TUMBUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD **TAHUN 2025**

		70	SUNGAI PAUR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		71	BUKIT BAKAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
9	MUARA PAPALIK	72	DUSUN MUDO	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		73	INTAN JAYA	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		74	BUKIT INDAH	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri
		75	KEMANG MANIS	Berkembang	Maju	Mandiri	Mandiri
		76	RANTAU BADAK LAMO	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		77	LUBUK SEBONTAN	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		78	SUNGAI PAPAUH	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		79	SUNGAI MULUK	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri
		80	PEMATANG BALAM	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri
10	SEBERANG KOTA	81	TUNGKAL IV DESA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		82	KUALA BARU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		83	TELUK PULAI RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		84	MEKAR ALAM	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		85	HARAPAN JAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		86	KUALA KAHAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		87	MUARA SEBERANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		88	BRAM ITAM KANAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
11	BRAM ITAM						

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH **TAHUN**
DINAS PMD **2025**

		89	TANJUNG SENUJULANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		90	PEMBENGIS	Maju	Maju	Maju	Maju
		91	BRAM ITAM RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		92	PANTAI GADING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		93	JATI EMAS	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		94	KEMUNING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		95	MEKAR TANJUNG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		96	SEMAU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
12	KUALA BETARA	97	SUNGAI DUALAP	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		98	BETARA KANAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		99	SUNGAI GEBAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		100	DATARAN PINANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		101	TANJUNG PASIR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		102	SUNGAI GEBAR BARAT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		103	SUNGAI DUNGUN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		104	KUALA INDAH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		105	SUAK LABU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
13	SENYERANG	106	SUNGAI KAYU ARO	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		107	TELUK KETAPANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD

TAHUN
2025

	108	SUNGAI RAMBAI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	109	MARGO RUKUN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	110	KEMPAS JAYA	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
	111	LUMAHAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	112	SUNGAI LANDAK	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	113	SUNGSANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	114	SUNGAI KEPAYANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sangat tertinggal	0	0	0	0
Tertinggal	2	2	0	0
Berkembang	91	91	76	72
Maju	18	18	31	28
Mandiri	3	3	7	14

114 114 114 114

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

Tabel III.7. Perbandingan Status Desa Hasil Pendataan IDM 2024 dan Indeks Desa 2025

NO	KODE PUM	NAMA DESA	SKOR IDM 2024	STATUS IDM 2024	SKOR ID	STATUS INDEKS DESA 2025	KETERANGAN
1	1506012001	BADANG	0,6502	Berkembang	68,5	Berkembang	Tetap
2	1506012002	TANJUNG TAYAS	0,6389	Berkembang	65,35	Berkembang	Tetap
3	1506012003	KUALA DASAL	0,6408	Berkembang	66,46	Berkembang	Tetap
4	1506012004	PEMATANG PAUH	0,6757	Berkembang	64,41	Berkembang	Tetap
5	1506012006	TAMAN RAJA	0,656	Berkembang	69,45	Maju	Naik 1
6	1506012017	BRASAU	0,7092	Maju	64,72	Berkembang	Turun 1
7	1506012019	GEMURUH	0,6911	Berkembang	68,35	Berkembang	Tetap
8	1506012020	PEMATANG TEMBESU	0,6497	Berkembang	61,42	Berkembang	Tetap
9	1506012021	BADANG SEPAKAT	0,7429	Maju	65,83	Berkembang	Turun 1
10	1506022003	TUNGKAL I	0,6498	Berkembang	72,28	Maju	Naik 1
11	1506022014	TELUK SIALANG	0,6778	Berkembang	75,59	Maju	Naik 1
12	1506032006	PARIT PUDIN	0,6833	Berkembang	60,79	Berkembang	Tetap
13	1506032007	SUNGAI SERINDIT	0,6792	Berkembang	61,26	Berkembang	Tetap
14	1506032008	MEKAR JATI	0,6465	Berkembang	59,84	Berkembang	Tetap
15	1506032012	SUNGAI PAMPANG	0,6214	Berkembang	59,37	Berkembang	Tetap
16	1506032013	PARIT SIDANG	0,6314	Berkembang	62,52	Berkembang	Tetap
17	1506032014	SUNGAI JERING	0,7106	Maju	73,39	Maju	Tetap
18	1506032015	PARIT BILAL	0,6521	Berkembang	66,93	Berkembang	Tetap
19	1506032016	SUAK SAMIN	0,6479	Berkembang	58,74	Berkembang	Tetap
20	1506032017	SUNGAI BAUNG	0,6457	Berkembang	65,35	Berkembang	Tetap
21	1506032018	KARYA MAJU	0,6589	Berkembang	75,75	Maju	Naik 1
22	1506032019	SUNGAI RAYA	0,6348	Berkembang	59,53	Berkembang	Tetap
23	1506032020	PASAR SENIN	0,6584	Berkembang	62,36	Berkembang	Tetap
24	1506042001	PEMATANG LUMUT	0,7486	Maju	74,49	Maju	Tetap
25	1506042008	MAKMUR JAYA	0,6363	Berkembang	70,24	Maju	Naik 1
26	1506042009	SERDANG JAYA	0,8033	Maju	75,91	Maju	Tetap
27	1506042010	TERJUN GAJAH	0,7238	Maju	72,76	Maju	Tetap
28	1506042011	LUBUK TERENTANG	0,6746	Berkembang	64,09	Berkembang	Tetap
29	1506042012	PEMATANG BULUH	0,7383	Maju	72,76	Maju	Tetap
30	1506042013	MUNTIALO	0,7221	Maju	72,44	Maju	Tetap
31	1506042014	TELUK KULBI	0,6797	Berkembang	66,93	Berkembang	Tetap

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

32	1506042015	BUNGA TANJUNG	0,723	Maju	74,8	Maju	Tetap
33	1506042016	SUNGAI TERAP	0,7159	Maju	74,17	Maju	Tetap
34	1506042017	MANDALA JAYA	0,7495	Maju	72,13	Maju	Tetap
35	1506052005	PENYABUNGAN	0,6571	Berkembang	77,64	Maju	Naik 1
36	1506052006	LUBUK TERAP	0,7329	Maju	72,6	Maju	Tetap
37	1506052008	TANJUNG PAKU	0,6292	Berkembang	65,98	Berkembang	Tetap
38	1506052012	TANJUNG BENANAK	0,7562	Maju	85,67	Mandiri	Naik 1
39	1506052013	BUKIT HARAPAN	0,8275	Mandiri	83,15	Mandiri	Tetap
40	1506052014	ADI PURWA	0,8192	Mandiri	82,2	Mandiri	Tetap
41	1506052018	PINANG GADING	0,8379	Mandiri	83,31	Mandiri	Tetap
42	1506052020	MERLUNG	0,6425	Berkembang	63,62	Berkembang	Tetap
43	1506052021	TANJUNG MAKMUR	0,7411	Maju	70,24	Maju	Tetap
44	1506062002	PURWODADI	0,9122	Mandiri	89,61	Mandiri	Tetap
45	1506062003	SUKA DAMAI	0,7149	Maju	74,33	Maju	Tetap
46	1506062004	ADI JAYA	0,754	Maju	70,87	Maju	Tetap
47	1506062005	KELAGIAN	0,6554	Berkembang	61,73	Berkembang	Tetap
48	1506062006	TELUK PENGKAH	0,7092	Maju	63,62	Maju	Tetap
49	1506062007	TALANG MAKMUR	0,7075	Maju	64,09	Berkembang	Turun 1
50	1506062008	SUNGAI KERUH	0,6443	Berkembang	72,76	Maju	Naik 1
51	1506062009	DATARAN KEMPAS	0,844	Mandiri	86,46	Mandiri	Tetap
52	1506062010	DELIMA	0,7686	Maju	78,43	Maju	Tetap
53	1506072002	SRI AGUNG	0,7216	Maju	77,32	Maju	Tetap
54	1506072003	SUBAN	0,8114	Maju	77,48	Maju	Tetap
55	1506072004	TANJUNG BOJO	0,6698	Berkembang	67,24	Berkembang	Tetap
56	1506072005	KAMPUNG BARU	0,7351	Maju	73,07	Maju	Tetap
57	1506072006	LUBUK BERNAI	0,6298	Berkembang	61,57	Berkembang	Tetap
58	1506072007	RAWA MEDANG	0,6983	Berkembang	60,47	Berkembang	Tetap
59	1506072008	SUNGAI PENOBAN	0,599	Berkembang	77,32	Maju	Naik 1
60	1506072009	RAWANG KEMPAS	0,6063	Berkembang	65,35	Berkembang	Tetap
61	1506072010	LUBUK LAWAS	0,6706	Berkembang	65,35	Berkembang	Tetap
62	1506072011	SUNGAI BADAR	0,666	Berkembang	68,35	Berkembang	Tetap
63	1506082002	PULAU PAUH	0,6946	Berkembang	65,51	Berkembang	Tetap
64	1506082003	RANTAU BENAR	0,757	Maju	67,87	Berkembang	Turun 1
65	1506082004	LAMPISI	0,7227	Maju	68,35	Berkembang	Turun 1
66	1506082005	CINTA DAMAI	0,7073	Maju	71,65	Maju	Tetap
67	1506082006	SUNGAI ROTAN	0,72	Maju	66,61	Berkembang	Turun 1
68	1506082007	MUARA DANAU	0,7032	Berkembang	65,98	Berkembang	Tetap
69	1506082008	TANAH TUMBUH	0,6771	Berkembang	63,94	Berkembang	Tetap
70	1506082009	SUNGAI PAUR	0,6776	Berkembang	63,78	Berkembang	Tetap

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

71	1506082010	BUKIT BAKAR	0,6759	Berkembang	59,06	Berkembang	Tetap
72	1506092002	DUSUN MUDO	0,8189	Mandiri	71,81	Maju	Turun 1
73	1506092003	INTAN JAYA	0,8508	Mandiri	64,25	Berkembang	Turun 2
74	1506092004	BUKIT INDAH	0,8249	Mandiri	69,76	Maju	Turun 1
75	1506092005	KEMANG MANIS	0,8749	Mandiri	70,08	Maju	Turun 1
76	1506092006	RANTAU BADAQ LAMO	0,8635	Mandiri	68,82	Berkembang	Turun 2
77	1506092007	LUBUK SEBONTAN	0,8208	Mandiri	75,75	Maju	Turun 1
78	1506092008	SUNGAI PAPAUH	0,8168	Mandiri	69,29	Berkembang	Turun 2
79	1506092009	SUNGAI MULUK	0,8759	Mandiri	72,28	Maju	Turun 1
80	1506092010	PEMATANG BALAM	0,8168	Mandiri	72,13	Maju	Turun 1
81	1506102002	TUNGKAL IV DESA	0,6179	Berkembang	75,28	Maju	Naik 1
82	1506102003	KUALA BARU	0,6308	Berkembang	65,67	Berkembang	Tetap
83	1506102004	TELUK PULAI RAYA	0,6706	Berkembang	67,09	Berkembang	Tetap
84	1506102005	MEKAR ALAM	0,6181	Berkembang	67,24	Berkembang	Tetap
85	1506102006	HARAPAN JAYA	0,6971	Berkembang	69,29	Berkembang	Tetap
86	1506102007	KUALA KAHAR	0,7	Berkembang	69,13	Berkembang	Tetap
87	1506102008	MUARA SEBERANG	0,6568	Berkembang	62,36	Berkembang	Tetap
88	1506112002	BRAM ITAM KANAN	0,6649	Berkembang	68,82	Berkembang	Tetap
89	1506112003	TANJUNG SENJULANG	0,6197	Berkembang	62,05	Berkembang	Tetap
90	1506112004	PEMBENGIS	0,8138	Maju	74,02	Maju	Tetap
91	1506112005	BRAM ITAM RAYA	0,6646	Berkembang	78,27	Maju	Naik 1
92	1506112006	PANTAI GADING	0,6994	Berkembang	64,25	Berkembang	Tetap
93	1506112007	JATI EMAS	0,6573	Berkembang	65,2	Berkembang	Tetap
94	1506112008	KEMUNING	0,6571	Berkembang	64,25	Berkembang	Tetap
95	1506112009	MEKAR TANJUNG	0,653	Berkembang	66,3	Berkembang	Tetap
96	1506112010	SEMAU	0,6513	Berkembang	59,21	Berkembang	Tetap
97	150612002	SUNGAI DUALAP	0,631	Berkembang	77,8	Maju	Naik 1
98	150612003	BETARA KANAN	0,6667	Berkembang	66,46	Berkembang	Tetap
99	150612004	SUNGAI GEBAR	0,6014	Berkembang	63,62	Berkembang	Tetap
100	150612005	DATARAN PINANG	0,6233	Berkembang	62,52	Berkembang	Tetap
101	150612006	TANJUNG PASIR	0,6078	Berkembang	66,61	Berkembang	Tetap
102	150612007	SUNGAI GEBAR BARAT	0,6084	Berkembang	67,72	Berkembang	Tetap
103	150612008	SUNGAI DUNGUN	0,6048	Berkembang	61,57	Berkembang	Tetap
104	150612009	KUALA INDAH	0,6683	Berkembang	65,67	Berkembang	Tetap
105	150612010	SUAK LABU	0,6514	Berkembang	64,09	Berkembang	Tetap
106	1506132002	SUNGAI KAYU ARO	0,646	Berkembang	58,58	Berkembang	Tetap

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

107	1506132003	TELUK KETAPANG	0,6211	Berkembang	69,76	Maju	Naik 1
108	1506132004	SUNGAI RAMBAI	0,689	Berkembang	75,28	Maju	Naik 1
109	1506132005	MARGO RUKUN	0,7062	Berkembang	62,83	Berkembang	Tetap
110	1506132006	KEMPAS JAYA	0,7887	Maju	71,34	Maju	Tetap
111	1506132007	LUMAHAN	0,6922	Berkembang	69,13	Berkembang	Tetap
112	1506132008	SUNGAI LANDAK	0,7035	Berkembang	62,68	Berkembang	Tetap
113	1506132009	SUNGSANG	0,6208	Berkembang	62,05	Berkembang	Tetap
114	1506132010	SUNGAI KEPAYANG	0,6921	Berkembang	61,42	Berkembang	Tetap

<u>Keterangan</u>	<u>IDM 2024</u>	<u>ID 2025</u>
Desa Mandiri :	14	6
Desa Maju :	28	39
Desa Berkembang :	72	69
Jumlah Desa		
Keseluruhan :	114	114

Perbandingan diatas, status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dan Indeks Desa Tahun 2025 menunjukkan penurunan jumlah Desa Mandiri, tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah Desa Maju dan penurunan jumlah Desa Berkembang.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2025

Tabel.III.8 Target dan Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi awal (2020)	Target Tahun					Realisasi Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
13.1	Cakupan sarana dan prasarana pertanoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4543	4258	4770	4967	
13.3	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.4	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.5	Persentase pengentasan desa tertinggal (IKK Outcome)	60,35%	87,50 %	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	0%	0%	0%
13.6	Persentase peningkatan status desa mandiri (IKK Outcome)	0,00%	0,00 %	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	1,10%	3,45%	5,26%	18%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD
TAHUN 2025

Tabel.III.9 Target dan Realisasi RPJMD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						REALISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Persentase desa berstatus Swasembada terhadap total desa	%	14,04	16,67	17,54	18,42	19,30	20,18	22,30	17,54
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase pengentasan desa tertinggi	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967
4	Persentase posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,26	18,06	7,25	7,81	8,47	12,96	23,40	18,06
6	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	99	100	100	100	100	100	100	100

A. Program Penataan Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dilaksanakan Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa. Desa persiapan Rimbo asri, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi dan Desa persiapan Sungai Ari, Desa Suban Kecamatan Batang Asam, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Desa Persiapan.

Permasalahannya adalah belum tercapainya kesepakatan batas desa induk maupun desa yang akan dimekarkan.

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator program ini adalah;

1. Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkat kapasitasnya dengan target 45%, hanya terealisasi 42% (dari jumlah keseluruhan aparatur desa 1224 orang, yang mendapatkan pelatihan hanya 551 orang(45%) dan anggota BPD hanya 228 orang dari 582 orang (39%)), kurangnya pendanaan menjadi kendala, kedepan diharapkan dapat dilakukan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan anggota BPD lebih banyak lagi.

2. Persentase aparatur desa yang menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan dapat terealisasi 100%, kedepan diharapkan dapat terus dilakukan pembinaan terhadap penggunaan dana desa.

3. Persentase BUMdesa dan BUMdesa bersama yang telah mencapai pemeringkatan dengan status berkembang dengan target 40% hanya 31%, diharapkan dapat ditingkatkan lagi pembinaannya.

Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa, telah dilaksanakan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada 114 Desa.

Kendalanya adalah kurangnya SDM secara kuantitas dan kapabilitas.

2. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, telah dilaksanakan pelatihan 57 orang Kasi Pemerintahan Desa.
Permasalahannya adalah kurangnya dana sehingga tidak bisa mencakup semua aparatur
3. Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 114 BUMDesa dan 13 BUMDesa Bersama.
Kendalanya adalah SDM pengelola BUMdesa masih rendah terkait pengelolaan laporan keuangan BUMdesa sehingga pengelola BUMdesa kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan, baru pada tanggal 18 Desember 2023, Kemendesa dan PDT RI merilis penggunaan aplikasi laporan keuangan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa keterbatasan dana sehingga tidak bisa melaksanakan pelatihan bagi pengelola BUMdesa untuk pelatihan penyusun laporan, pelatihan pengelolaan usaha dan pelatihan Analisa usaha.
4. Fasilitasi penyusunan profil desa, telah dilaksanakan penyusunan profil desa
Kendalanya kurang meratanya signal di Desa sehingga seringkali terlambat dalam pengisian aplikasi profil desa, dan kurangnya pemahaman operator tentang pengumpulan data dan cara pengisian tiap indikator.
5. Fasilitasi pengelolaan aset desa, telah dilaksanakan pengelolaan aset desa
Kendalanya adalah kurangnya SDM secara kuantitas dan kapabilitas.
6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, dilakukan fasilitasi terhadap 10 Desa.
Permasalahannya belum adanya Berita Acara Kesepakatan antar Desa secara Poligon (keliling)
7. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, telah dilaksanakan. Desa Kemang manis menjadi Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Kelurahan Senyerang menjadi Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jambi.

Permasalahannya adalah kurangnya dana untuk pembinaan dan kurangnya pemahaman tentang administrasi desa dan pentingnya pengarsipan.

C. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat. Telah dilaksanakan temu kader posyandu dan lomba posyandu serta pembinaan KPM. Adanya pergantian KPM menjadi kendala yang menyebabkan kurang optimalnya SDM dalam penanganan pencegahan dan penurunan stunting.
2. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Tidak dilaksanakan lomba inovasi alat TTG dan lomba sekretariat posyantekdes, karena kurangnya peserta. Permasalahannya adalah masih kurangnya motivasi pengurus posyantek desa untuk memasyarakatkan teknologi tepat guna di desanya. Pemecahannya adalah dengan adanya hadiah yang lebih menarik.
3. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Telah dilaksanakan 10 program pokok PKK. Kendalanya adalah jadwal kegiatan dari pusat/provinsi yang belum dapat dipastikan, pemecahannya dengan menyediakan penganggaran yang fleksibel
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel. III.10. Capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Realisasi 2025	Capaian terhadap target target Akhir
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	83	83	83,06	100%
	Nilai SAKIP Dinas PMD	72	72	79,47	110%
2.	Persentase Desa Maju	33%	35%	34,21%	97,74%

Tabel. III.11. Capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian terhadap target target Akhir
1.	Indeks Desa (Rata-rata)	67,58	79,50	68,71	86,42%
2.	Persentase Desa Mandiri	5,26%	14,04%	5,26%	37,46%
3.	Persentase Desa Maju	34,21%	43,86%	34,21%	78%
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	86 (B)	91	83,06	91,27%
5.	Nilai SAKIP Dinas PMD	79 (BB)	85	79,47	93,49%

Dapat terlihat pada tabel diatas, sebagian pencapaian indikator sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan dalam status desa mandiri dan desa maju.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Tabel III.12. Perbandingan capaian IDM Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Rata-rata IDM Nasional	Rata-rata IDM Provinsi Jambi	Rata-rata Kabupaten Tanjung Jabung Barat
0,7034 (Berkembang)	0,7450 (Maju)	0,6993 (Berkembang)

Capaian Tahun 2024 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun, dengan rata-rata Nasional 0,7034 dengan status berkembang, untuk status IDM Provinsi Provinsi Jambi memperoleh 0,7450 termasuk status Maju. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 mendapatkan nilai rata-rata 0,6993 dengan status berkembang. Untuk Indeks Desa Tahun 2025, tidak ada perbandingannya.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- a. Sumber daya aparatur desa yang semakin baik melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga semakin besarnya bantuan keuangan yang diterima Desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Tingginya dukungan dan intervensi dari Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terhadap 6 (enam) Dimensi Indeks Desa, Dimensi Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa .

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya efisiensi, antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia
- b. Penggunaan listrik untuk AC, lampu, dan computer digunakan pada saat jam kerja. penggunaan air sesuai kebutuhan
- c. Alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan
- d. Pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan secara rutin

Meski kualitas dan kuantitas belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan

keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga sedikit banyak juga memberikan pengaruh dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dan mendukung pencapaian kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau merupakan kegiatan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut;

Tabel III.13 Program dan Kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
	Rp2.423.462.800	Rp2.463.256.300	Rp2.049.162.853	Rp414.093.447	83,19
PROGRAM PENATAAN DESA	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp1.027.019.800	Rp1.073.894.800	Rp939.139.800	Rp134.755.000	87,45
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp1.027.019.800	Rp1.073.894.800	Rp939.139.800	Rp134.755.000	87,45
Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp141.937.000	Rp132.537.000	Rp127.275.000	Rp5.262.000	96,03
Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp126.956.000	Rp119.831.000	Rp102.381.000	Rp17.450.000	85,44
Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp71.692.000	Rp112.210.000	Rp107.980.000	Rp4.230.000	96,23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

Sub Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Rp39.750.000	Rp39.750.000	Rp28.475.000	Rp11.275.000	71,64
Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Rp44.450.000	Rp44.450.000	Rp44.450.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp51.788.000	Rp50.418.000	Rp38.875.000	Rp11.543.000	77,11
Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp209.907.000	Rp200.249.000	Rp177.989.000	Rp22.260.000	88,88
Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp158.350.000	Rp192.260.000	Rp139.805.000	Rp52.455.000	72,72
Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Rp57.639.800	Rp57.639.800	Rp54.114.800	Rp3.525.000	93,88
Sub kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp124.550.000	Rp124.550.000	Rp117.795.000	Rp6.755.000	94,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp1.332.081.000	Rp1.371.361.500	Rp1.092.023.053	Rp279.338.447	79,63
kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.332.081.000	Rp1.371.361.500	Rp1.092.023.053	Rp279.338.447	79,63
Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp158.781.000	Rp260.329.500	Rp183.170.032	Rp77.159.468	70,36
Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp73.300.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp0	00,00
Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp1.100.000.000	Rp1.099.032.000	Rp896.853.021	Rp202.178.979	81,60

Program paling mendukung adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa, dimana didalam program ini terdapat;

- a. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan desa, yang berkaitan dengan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).
- b. Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa, dengan adanya BUM desa di setiap desa dapat menunjang perekonomian desa.

Tabel III. 14. BUMdesa yang berkontribusi terhadap PAD

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA
I	KECAMATAN TUNGKAL ULU			
		BRASAU	KARYA BERSAMA	Toko Bangunan, BRI Link, Sewa Pasar, Sewa GOR, Sewa Tenda, Sewa Kolam
II	KECAMATAN TEBING TINGGI			
		PURWODADI	BUMDES MANDIRI SEJAHTERA PWD	Pembuatan popok kompos, pengelolaan pasar, siram jalan, pisang cavendish, ternak sapi
		SUKA DAMAI	MAKMUR SEJAHTERA	Gas LPG 3 Kg, ternak kambing domba, Jual beli motor bekas, bengkel motor, BRI Link
		ADI JAYA	MAJU JAYA	Tandan buah segar, BRI Link, Simpan pinjam, pupuk dan racun, simpan pinjam perempuan, pertashop
		TELUK PENGKAH	MULIA	BRI Link
		TALANG MAKMUR	BUMDES MAKMUR SEJAHTERA	Pangkalan Gas LPG, TKBM Raam, Ambulance Desa
		SUNGAI KERUH	SUMBER REJEKI	Kompos, BRI Link, toko bangunan, toko pertanian, pangkalan gas LPG
		DATARAN KEMPAS	GERBANG NUSANTARA	Perantara kompos, pengelola pupuk, ternak sapi
III	KECAMATAN BATANG ASAM			
		SRI AGUNG	MAJU JAYA SRI AGUNG	Gas elpiji 3 kg, hentraktor, penggemukan sapi, budidaya madu
		KAMPUNG BARU	PESAPUAN JAYA MANDIRI	Toko bangunan, sewa tenda
		LUBUK LAWAS	BINA KARYA BERSAMA	Jasa perdagangan, Keuangan
IV	KECAMATAN RENA MENDALUH			
		CINTA DAMAI	JAYA KUSUMA	Tenda, molen, pasar

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD

TAHUN
2025

		BUKIT BAKAR	SUMBER MULIA	Ternak Sapi, Sewa Tenda pesta, Simpan Pinjam (SPP)
V	KECAMATAN MERLUNG			
		TANJUNG MAKMUR	MAKMUR BERSAMA	Penjualan ayam potong, Toko BUMDes, Produksi Pupuk Kompos
VI	KECAMATAN MUARA PAPALIK			
		DUSUN MUDO	KEMOTAI JAYA	Kompos, pasar, desmart
		INTAN JAYA	JAYA MAKMUR	Sewa kios pasar, sewa los pasar, bebek petelur, pakan bebek, simpan pinjam
		KEMANG MANIS	KEMANG NIAGA MANDIRI	Unit pasar desa, unit BRI Link, unit KN Mart, unit sewa
		LUBUK SEBONTAN	TIRTA MUKTI	Pam Desa, Do TBS, LKM, peternakan
		SUNGAI PAPAUH	MEKAR JAYA	BRI Link, waserda, saprodi
		PEMATANG BALAM	USAHA MAJU BERSAMA	Waserda, toko tani, BRI Link
VII	KECAMATAN SENYERANG			
		KEMPAS JAYA	JAYA LESTARI	Penyewaan tenda dan kursi, penyewaan sound system, BRI Link, penyertaan modal 100 juta
		SUNGAI LANDAK	CIPTA KARYA	Sewa kursi
		SUNGAI KEPAYANG	BUMDES MAJU SEJAHTERA	unit BRI Link, unit tenda, unit penyebrangan
VIII	KECAMATAN SEBERANG KOTA			
		KUALA KAHAR	BUMDES BERSAMA	Penyewaan tenda hajatan dan penyewaan mesin pengaduk semen (molen), unit PLTS tidak aktif, unit usaha saproten belum
IX	KECAMATAN BETARA			
		PEMATANG LUMUT	KARYA BHAKTI BERSAMA	Pengangkutan sampah, sewa mesin diesel, cucian mobil dan motor
		MAKMUR JAYA	BANGKIT BERSAMA	Tenda, perahu, budidaya ikan
		SERDANG JAYA	TEGAR GEMILANG	Sistem penyelenggara perdagangan alternatif, industri air minum isi ulang, koperasi simpan pinjam sekunder
		TERJUN GAJAH	PUJIKU ARTOMORO	Pamsimas, bidang pertanian, peternakan kambing
		MUNTIALO	BINA LESTARI	Wisata Embung, sewa tenda, isi ulang gas
		TELUK KULBI	JADI MULYA	Kantin pintar, simpan pinjam, jual beli sawit, sewa molen, sewa viar, sewa tenda, sewa kursi, jual beli pinang, wifi

		SUNGAI TERAP	AMANAHAH	Jual beli pinang dan tabung gas
		BUNGA TANJUNG	KARYA BAKTI	Rental perahu, rental molen, jual beli pinang, konter pulsa, simpan pinjam, kebun pinang
X	KECAMATAN PENGABUAN			
		SUNGAI SERINDIT	TRI KARSA/USAHA BERKAH PENGABUAN	Sewa tenda, sewa pompong, fotocopy dan ATK, jual beli padi, pipalisai
		MEKAR JATI	JATI MAKMUR	Wifi, tenda, molen, transportasi air
		PARIT BILAL	SUMBER MAKMUR	Jasa sewa tenda, alat transportasi viar
		SUAK SAMIN	SUMBER KENCANA	Tenda, viar, BRI Link, molen, genset
		SUNGAI RAYA	USAHA BERSAMA	Perdagangan, jasa internet desa
		PASAR SENIN	USAHA BERSAMA	Internet desa, tenda dan sound system
XI	KECAMATAN BRAM ITAM			
		BRAM ITAM KANAN	PRAMBANAN	Pembiayaan, Kebun sawit
		TANJUNG SENJULANG	USAHA KARYA BERSAMA	Sewa Tenda,sewa molen, jual beli material, depot air minum, fhotography
		PEMBENGIS	SEDERHANA	Perdagangan
		BRAM ITAM RAYA	RAYA	Sewa tenda hajatan, ATM Mini, Sewa molen beton, Jasa Videografi, Pembuatan medali dan souvenir
		JATI EMAS	SEPAH BERUANG	Unit usaha kompos, unit usaha sewa molen, unit usaha BRI Link, unit usaha pembibitan
		KEMUNING	USAHA KEMUNING	Tabung gas LPG 3 Kg, air bersih, lapak pasar, sewa tenda, sewa molen

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan dan fisik secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025, adalah dengan total anggaran sebesar Rp9.443.194.481,- dapat terserap sebesar 90,60% atau Rp8.555.401.098,- dengan realisasi fisik 100%.

Tabel III.15 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp7.316.462.781	Rp9.443.194.481	Rp8.555.401.098	Rp887.793.383	90,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.892.999.981	Rp6.979.938.181	Rp6.506.238.245	Rp473.699.936	93,21
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp58.970.000	Rp54.320.000	Rp53.320.000	Rp1.000.000	98,16
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp58.970.000	Rp54.320.000	Rp53.320.000	Rp1.000.000	98,16
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.754.372.581	Rp3.731.772.581	Rp3.435.215.319	Rp296.557.262	92,05
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.526.972.581	Rp3.526.972.581	Rp3.230.415.319	Rp296.557.262	91,59
Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp227.400.000	Rp204.800.000	Rp204.800.000	Rp0	100,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp42.500.000	Rp40.250.000	Rp40.250.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp42.500.000	Rp40.250.000	Rp40.250.000	Rp0	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp602.427.400	Rp538.205.600	Rp527.202.975	Rp11.002.625	97,96
Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.284.000	Rp3.284.000	Rp3.284.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp42.990.000	Rp41.226.000	Rp39.102.000	Rp2.124.000	94,85
Penyediaan bahan logistik kantor	Rp13.500.000	Rp13.500.000	Rp8.850.000	Rp4.650.000	65,56

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

Penyediaan barang cetakan penggandaan	Rp41.664.400	Rp49.816.400	Rp46.313.716	Rp3.502.684	92,97
Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp4.558.000	Rp442.000	91,16
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp495.989.000	Rp425.379.200	Rp425.095.259	Rp283.941	99,93
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp0	Rp196.112.000	Rp196.050.420	Rp61.580	99,97
Sub Kegiatan pengadaan mebel		Rp56.312.000	Rp56.290.320	Rp21.680	99,96
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Rp139.800.000	Rp139.760.100	Rp39.900	99,97
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp126.780.000	Rp2.121.328.000	Rp1.977.500.495	Rp143.827.505	93,22
Sub kegiatan Penyediaan surat menyurat	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp88.280.000	Rp88.280.000	Rp51.359.791	Rp36.920.209	58,18
Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp36.500.000	Rp2.031.048.000	Rp1.924.140.704	Rp106.907.296	94,74
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp307.950.000	Rp297.950.000	Rp276.699.036	Rp21.250.964	92,87
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Rp176.510.000	Rp176.510.000	Rp156.324.216	Rp20.185.784	88,56
Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp9.460.000	Rp9.460.000	Rp8.850.000	Rp610.000	93,55
Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp121.980.000	Rp111.980.000	Rp111.524.820	Rp455.180	99,59
PROGRAM PENATAAN DESA	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Rp64.362.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp1.027.019.800	Rp1.073.894.800	Rp939.139.800	Rp134.755.000	87,45
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp1.027.019.800	Rp1.073.894.800	Rp939.139.800	Rp134.755.000	
Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rp141.937.000	Rp132.537.000	Rp127.275.000	Rp5.262.000	96,03
Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp126.956.000	Rp119.831.000	Rp102.381.000	Rp17.450.000	85,44

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2025**

Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp71.692.000	Rp112.210.000	Rp107.980.000	Rp4.230.000	96,23
Sub Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Rp39.750.000	Rp39.750.000	Rp28.475.000	Rp11.275.000	71,64
Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Rp44.450.000	Rp44.450.000	Rp44.450.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp51.788.000	Rp50.418.000	Rp38.875.000	Rp11.543.000	77,11
Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	p209.907.000	p200.249.000	Rp177.989.000	Rp22.260.000	88,88
Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	p158.350.000	p192.260.000	Rp139.805.000	Rp52.455.000	72,72
Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	p57.639.800	p57.639.800	Rp54.114.800	Rp3.525.000	93,88
Sub kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	p124.550.000	Rp124.550.000	Rp117.795.000	Rp6.755.000	94,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp1.332.081.000	Rp1.371.361.500	Rp1.092.023.053	Rp279.338.447	79,63
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.332.081.000	Rp1.371.361.500	Rp1.092.023.053	Rp279.338.447	79,63
Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp158.781.000	Rp260.329.500	Rp183.170.032	Rp77.159.468	70,36
Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp73.300.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp0	100,00
Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp1.100.000.000	Rp1.099.032.000	Rp896.853.021	Rp202.178.979	81,60

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun ada kendala yang dihadapi. Untuk kedepan, agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia agar tercapai sasaran strategis yang diinginkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan Lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa antara lain sebagai berikut;

- a. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- b. Pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa
- c. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Masih kurangnya inovasi-inovasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa

B. Langkah kedepan

Langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain;

- a. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan desa
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- c. Membangun semua pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang merupakan merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien. Semoga ditahun-tahun mendatang program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaian kinerjanya akan lebih baik lagi, Amin.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, IV
DAN INDIVIDU TAHUN 2025**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KualaTungkal,

2025

PIHAK KEDUA

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (Rata-rata)	67,58
		Persentase Desa Mandiri	5,26%
2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21%
3.	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisien dan efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	86 (B)
		Nilai SAKIP Dinas PMD	79 (BB)

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.979.938.181,-	Pendapatan Asli Daerah
II. Program Penataan Desa	Rp 18.000.000,-	(PAD)
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.073.894.800,-	
IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.371.361.500,-	

Kuala Tungkal, 2025

Bupati Tanjung Jabung Barat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 198406242011011005

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas dan Fungsi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa (Rata-rata)	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran	$= \frac{\text{Total Indeks Desa seluruh desa}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PMD	
		Persentase Desa Mandiri	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran	$= \frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PMD	
1.a	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran	$= \frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PMD	

Kuala Tungkal,

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 198406242011011005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARDHIAN, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005


ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 SEKRETARIS DINAS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisien dan efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	83
		Nilai SAKIP Dinas PMD	72
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.979.938.181 ,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp54.320.000,-	
a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp54.320.000,-	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.731.772.581,-	
a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan keuangan	Rp3.526.972.581,-	
b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp204.800.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp40.250.000,-	
a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Rp40.250.000,-	
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp538.205.600,-	
a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.284.000,-	
b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp41.226.000,-	
c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Rp13.500.000,-	
d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp49.816.400,-	
e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp5.000.000,-	

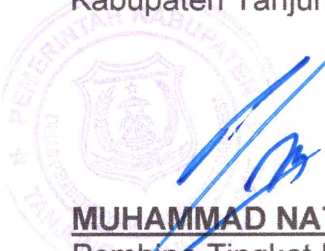
- | | |
|--|-------------------|
| f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp425.379.200,- |
| 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp196.112.000,- |
| a. Sub kegiatan pengadaan mebel | Rp56.312.000,- |
| b. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Rp139.800.000,- |
| 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp2.121.328.000,- |
| a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat | Rp2.000.000,- |
| b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | Rp88.280.000,- |
| c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Rp2.031.048.000,- |
| 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp297.950.000,- |
| a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp176.510.000,- |
| b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Rp9.460.000,- |
| c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Rp111.980.000,- |

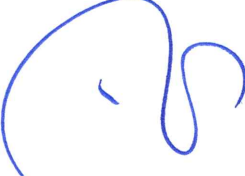
Kuala Tungkal,

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005


ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESSY ZUZANNA, S. Pd. I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA


DESSY ZUZANNA, S. Pd I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	100%
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	45%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penataan Desa	Rp18.000.000,-	Pendapatan Asli Daerah
1. Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Rp18.000.000,-	(PAD)
a. Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Rp18.000.000,-	
II. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp609.729.800,-	
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp609.729.800,-	
a. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp119.831.000,-	
b. Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Rp39.750.000,-	
c. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp200.249.000,-	
d. Sub kegiatan penetapan dan penegasan batas desa	Rp192.260.000,-	

e. Sub kegiatan fasilitasi pembinaan
laporan kepala desa

Rp57.639.800,-

Kuala Tungkal,

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat




MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

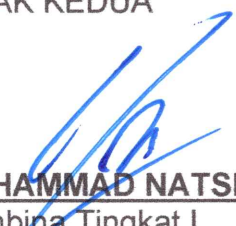
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA



Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase BUM desa dan BUM desa bersama yang telah mencapai pemeringkatan dengan status berkembang	40%
2.	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp281.210.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp281.210.000,-	
a. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Rp112.210.000,-	
b. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Rp44.450.000,-	
c. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp124.550.000,-	

- II. Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat Rp1.371.361.500,-
1. Kegiatan pemberdayaan Lembaga
kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pemberdayaan desa dan Lembaga adat
tingkat daerah kabupaten/kota serta
pemberdayaan masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam daerah kabupaten/kota Rp1.371.361.500,-
- a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas
kelembagaan Lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang taruna), Lembaga adat
desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Rp260.329.500,-
- b. Sub kegiatan fasilitasi pemerintah desa
dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Rp12.000.000,-
- c. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK
dalam penyelenggaraan Gerakan
pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga Rp1.099.032.000,-

Kuala Tungkal,

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA


H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp182.955.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp182.955.000,-	
a. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp132.537.000,-	
b. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp50.418.000,-	

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANA FARADINA, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARDHIAN, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Mei 2025

PIHAK KEDUA

ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002

PIHAK PERTAMA

ANA FARADINA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820402 200904 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen tahunan yang disusun	6 dokumen
1.	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp54.320.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp54.320.000,-	

Kuala Tungkal, Mei 2025

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ANA FARADINA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820402 200904 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARDHIAN, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002

PIHAK PERTAMA

GUSNIAR, S.E, M.E
Pembina
NIP. 19830401 200604 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 dokumen
		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%
		Cakupan layanan administrasi umum	100%
		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	51 unit
		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		Jumlah total BMD yang terpelihara	55 Unit

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.925.618.181 ,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.731.772.581,-	
a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan keuangan	Rp3.526.972.581,-	
b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp204.800.000,-	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp40.250.000,-	
a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Rp40.250.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp538.205.600,-	
a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.284.000,-	
b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp41.226.000,-	

c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Rp13.500.000,-
d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp49.816.400,-
e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp5.000.000,-
f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp425.379.200,-
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp196.112.000,-
a. Sub kegiatan pengadaan mebel	Rp56.312.000,-
b. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp139.800.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.121.328.000,-
a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp2.000.000,-
b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp88.280.000,-
c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp2.031.048.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp297.950.000,-
a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp176.510.000,-
b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp9.460.000,-

c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi

Gedung kantor dan bangunan lainnya

Rp111.980.000,-

Kuala Tungkal,

2025

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002



GUSNIAR, S.E, ME
Pembina
NIP. 19830401 200604 2 021



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRIAN EFFENDI**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN LOVITA, SKM**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

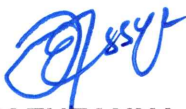
DIAN LOVITA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang
b.	Terlaksananya fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	114 laporan
c.	Adanya telaah staf terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah dokumen telaah staf terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan Badan Permasyarakatan Desa	2 dokumen

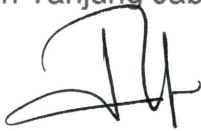
Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DIAN LOVITA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 199703 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIMA RUSILOWATI, S.IP**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd. I**
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

RIMA RUSILOWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19791012 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang
b.	Terselenggarakannya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	10 laporan

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013



RIMA RUSILOWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19791012 201001 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BOBBI KURNIA HAJAR, SH**

Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I

Pembina

NIP. 19780328 200604 2 013

BOBBI KURNIA HAJAR, SH

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19960621 202012 1 009

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	2 Desa
2.	Terlaksananya Pembentukan Data Geospasial untuk Penegasan Batas Desa	Jumlah Data geospasial untuk Penegasan Batas Desa	10 Data

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



BOBBI KURNIA HAJAR, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19960621 202012 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512

Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERRY IRAWAN, S.AP**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I

Pembina

NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

FERRY IRAWAN, S.AP

Penata

NIP. 19750616 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan aparatur pemerintah desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Menganalisa dan mengolah data aparatur pemerintah desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi data aparatur pemerintah desa	Jumlah data yang dievaluasi	114 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi data aparatur pemerintah desa	Jumlah laporan yang dibuat	1 berkas

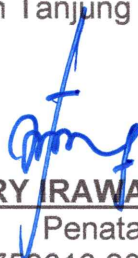
Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penelaah Teknis Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



FERRY IRAWAN, S.AP
Penata
NIP. 19750616 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESNITHA RAHAYU, SH**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

DESNITHA RAHAYU, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750618 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 Dokumen
2.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%
a.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	289 lembaga kemasyar akatan
b.	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESNITHA RAHAYU, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750618 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERDIANSYAH, SE**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

MERDIANSYAH, SE

Penata

NIP. 19810902 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	1 Dokumen
2.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MERDIANSYAH, SE
Penata
NIP. 19810902 201101 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROZIANDA, SH**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

ROZIANDA, SH
Golongan IX
NIP. 19941223 202421 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 dokumen

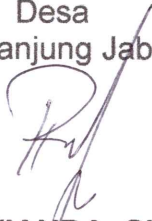
Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Pertama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ROZIANDA, SH
Golongan IX
NIP. 19941223 202421 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSITO**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

WARSITO
Penata Muda
NIP. 19790129 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah bahan yang diproses	114 berkas

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



WARSITO
Penata Muda
NIP. 19790129 200701 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAMRI ERIADY, ST**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : **Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

TAMRI ERIADY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19801025 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 Dokumen
b.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa	1 Laporan
2.	Tersedianya informasi terkait perumusan masalah kebijakan pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen informasi terkait perumusan masalah kebijakan pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa	2 dokumen
3.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa	2 dokumen

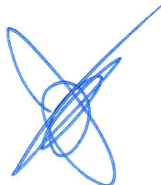
Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



TAMRI ERIADY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19801025 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMILA HITANOVA, SE**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP

Pembina

NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

AMILA HITANOVA, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19730313 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AMILA HITANOVA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730313 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIRIN, S.Sy**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Mei 2025

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

RIRIN, S.Sy
Penata Muda
NIP. 19920706 202504 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Pertama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



RIRIN, S.Sy
Penata Muda
NIP. 19920706 202504 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURJANNAH MY, S.Sos**

Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANA FARADINA, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ANA FARADINA, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19820402 200904 2 005

NURJANNAH MY, S.Sos

Penata Muda

NIP. 19940603 202504 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI PERTAMA
SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan

Kuala Tungkal, Mei 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ANA FARADINA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820402 200904 2 005

Perencana Ahli Pertama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



NURJANNAH MY, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19940603 202504 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY SUMARNO**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

GUSNIAR, S.E, ME

Pembina

NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA

EDY SUMARNO

Pengatur Tingkat I

NIP. 19820807 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

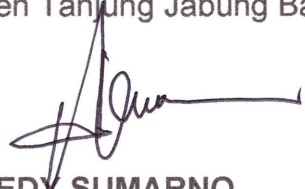
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyiapkan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah berkas yang dibuat	28 berkas
2.	Menyiapkan administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah Berkas yang dibuat	24 berkas

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


GUSNIAR, S.E., ME
Pembina
NIP. 19830401 200604 2 021

Pengadministrasi Perkantoran
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


EDY SUMARNO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19820807 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512

Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

GUSNIAR, S.E, ME

Pembina

NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA

SYARIPUDIN

Penata Muda

NIP. 19790322 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan	Jumlah dokumen yang dibuat	84 dokumen
2.	Terlaksananya pembukuan dan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan	Jumlah dokumen yang dibukukan	84 dokumen
3.	Terlaksananya pembayaran atas belanja keperluan dinas	Jumlah pembayaran yang dilakukan	200 kali
4.	Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pengguna anggaran	Jumlah laporan yang dibuat	12 laporan

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



GUSNIAR, S.E., ME

Pembina

NIP. 19830401 200604 2 021



SYARIPUDIN

Penata Muda

NIP. 19790322 200701 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASPUL ANWAR**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA


GUSNIAR, S.E, ME
Pembina
NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA


KASPUL ANWAR
Pengatur
NIP. 19730618 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan penyusunan bahan dan dokumentasi untuk rekonsiliasi aset	Jumlah bahan dan dokumentasi penyusunan	13 berkas
2.	Melakukan inventarisasi barang per ruangan (KIR)	Jumlah KIR yang dibuat	13 dokumen
3.	Membuat laporan tentang kondisi asset yang ada	Laporan yang dibuat	12 laporan

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



GUSNIAR, S.E., ME
Pembina

NIP. 19830401 200604 2 021

Pengadministrasi Perkantoran
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



KASPUL ANWAR
Pengatur

NIP. 19730618 200701 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUBUDIYAH**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


GUSNIAR, S.E, ME
Pembina
NIP. 19830401 200604 2 021


NURUBUDIYAH
Penata Muda
NIP. 19800610 200701 2 032

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data terkait dengan urusan kepegawaian	Jumlah bahan yang dikumpulkan	24 dokumen
2.	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah bahan yang dikerjakan	12 dokumen
3.	Terlaksananya penyimpanan arsip kepegawaian	Jumlah data yang diarsipkan	24 dokumen
4.	Membuat laporan hasil pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian	Jumlah laporan yang dibuat	1 laporan

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


GUSNIAR, S.E., ME
Pembina

NIP. 19830401 200604 2 021


NURUBUDIYAH
Penata Muda
NIP. 19800610 200701 2 032



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI APRIANSYAH**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2025

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

DEDI APRIANSYAH
Pengatur Tingkat I
NIP. 19830422 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah dan menganalisa bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang evaluasi	114 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi bahan/data aset desa	Jumlah laporan yang dibuat	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Pengadministrasi Perkantoran
Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DEDI APRIANSYAH
Pengatur Tingkat I
NIP. 19830422 201101 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP

Pembina

NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

WAHYUDI

Penata Muda

NIP. 19731010 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah dan menganalisa bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang evaluasi	114 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah laporan yang dibuat	12 dokumen

Kuala Tungkal, 2025

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



WAHYUDI
Penata Muda
NIP. 19731010 200604 1 015